



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025-2029



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Bappeda dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Sekretariat Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana

Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Jember, 23 September 2025
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Jember



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah	17
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Sekretariat Daerah.....	17
2.1.2 Sumber daya Sekretariat Daerah.....	19
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	20
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah	29
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	29
A. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah.....	
B. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	

C. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Pemerintah Provinsi.....	
D. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
2.2.2 Penentuan Isu - Isu Strategis.....	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	501
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah.....	51
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah.....	514
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	585
BAB V PENUTUP	206

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Error! Bookmark not defined.	21
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember		23
Tabel 2.3 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai ..		25
Tabel 2.4 Nilai Aset Tetap Sekretariat Daerah		26
Tabel 2.5 SDM Sekretariat Daerah Berdasarkan Kelompok Jabatan		27
Tabel 2.6 SDM Sekretariat daerah Berdasarkan Pendidikan... ..		28
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah		29
Tabel 2.9. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L		43
Tabel 2.10. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi		46
Tabel 2.11. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW		48
Tabel 2.12. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi KLHS		49
Tabel 2.13. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD		50
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah		51
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan		55
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		59
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan		103
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah		202
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD		203
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD		203

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Misi RPJMD Kab Jember 2025-2029	61
Gambar 2.2 Logical Framework Misi 3 RPJMD Kab. Jember	62
Gambar 3.1 Logical Framework Sekretariat daerah Kab Jember.....	61
Gambar 3.2 Cascading	62
Gambar 4.1 Logical Framework Sekretariat daerah Kab Jember.....	61
Gambar 4.2 Cascading	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Sekretariat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Sekretariat Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Sekretariat Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Sekretariat Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Sekretariat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra

Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Sekretariat Daerah harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin

dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun lima dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

2.1.2 Sumber daya Sekretariat Daerah

2.1.3 Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah /termasuk capaian SPM)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

3.1 Tujuan Sekretariat Daerah

3.2 Sasaran Sekretariat Daerah

3.3 Strategi Sekretariat Daerah

3.4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.1.1 Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, Lembaga teknis dan lembaga lainnya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber daya Sekretariat Daerah

Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat Daerah.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah /termasuk capaian SPM

Kinerja Sekretariat Daerah meliputi Urusan Penunjang Pemerintahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan penunjang dengan tujuan Meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember.

Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)			(12)	(13)	(184		
1	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
2	Nilai SAKIP (Kabupaten)	-	-	-	70,47	73,47	77,26	-	-	63,12	62,14	62,50	-	-	89,57%	84,57%	80,89%	-	-
3	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	-	-	-	93%	95%	96%	-	-	100%	100%	100%	-	-	107%	105%	104%	-	-
4	Persentase kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	-	-	-	95%	95%	95%	-	-				-	-				-	-
5	Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
6	Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B	B	B	-	-	B	B	B	-	-	100%	100%	100%	-	-
8	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	3,00	3,25	3,50	-	-	3,66	4,51	4,52	-	-	122%	138%	129%	-	-

Dari sajian tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah selama periode Renstra 2021-2026 , yaitu khususnya pada tahun 2022, 2023 dan 2024 menunjukkan masih adanya kesenjangan / gap pada beberapa pelayanan. Pelayanan telah mencapai target, karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada serta inovasi , antara lain pada indikator pelayanan :

- Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi
- Persentase kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama
- Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi
- Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pembangunan
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Indeks Pelayanan Publik

Kesenjangan/gap pelayanan, terdapat pada indikator :

- Nilai SAKIP (Kabupaten), tidak tercapai sesuai target. Berdasarkan LHE AKIP Kementerian PANRB kelemahan terdapat pada seluruh aspek SAKIP, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal. Sekretariat daerah, dalam hal ini Bagian Organisasi merupakan koordinator pada aspek / area pelaporan kinerja. Dimana berdasarkan rekomendasi evaluasi menunjukkan masih lemah pada pemanfaatan Laporan Kinerja sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya. Yang berarti hasil capaian yang dilaporkan tidak dijadikan bahan evaluasi dan penentuan target kinerja serta strategi pencapaian tahun berikutnya. Serta adanya rekomendasi pada perbaikan pelaporan khususnya pada penyajian analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat daerah.

Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-				Rata-Rata Pertumbuhan		
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)			(11)	(12)
Bagian Organisasi																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.340.532.000	1.667.473.000	2.636.500.000			1.117.577.900	1.233.058.775	1.184.303.703			83,37%	73,95%	44,92%			41%	6,7%
Bagian Umum.257																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	44.17.200.241	61.403.511.824	52.490.984.083			41.862.143.500	57.015.76.737	39.717.596.817			83%	90%	71%				
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.257.914.592	4.747.634.200	5.503.411.000			6.067.189.145	4.727.885.784	3.956.801.441			97%	100%	72%				
Bagian Tata Pemerintahan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	837.820.257	1.049.197.075	2.460.546.640			784.832.894	930.407.140	922.409.150			95%	95%	40%			41%	108,39%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.019.468.145	1.017.556.135	3.225.453.360			977.854.129	968.167.388	1.306.992.675			93%	88%	37%			13%	17,01%
Bagian Kesejahteraan Rakyat																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.099.139.000	900.227.500	1.333.742.400			969.590.522	701.936.793	546.472.116			88%	78%	41%			4%	5%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	53.097.657.435	54.908.723.097	55.650.070.600			37.098.345.670	36.987.076.897	38.705.367.400			70%	67%	70%			5%	5%
Bagian Hukum																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.212.330.552	1.126.041.900	1.531.557.000			939.357.660	941.454.036	798.806.777			78%	84%	52%			73%	71%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.388.450.000	2.478.717.100	2.401.088.000			1.929.954.750	2.306.029.680	1.755.468.000			80%	93%	73%			99%	82%
Bagian Administrasi Pembangunan																	

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.099.139.000	900.227.500	951.290.000			969.590.522	701.936.793	21.559.328			88%	78%	76%			4%	25%
BagianPerekonomian dan SDA																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.936.033.300	4.609.157.900	2.584.515.500			1.710.144.885	3.841.390.067	588.751.124			88,33%	83,34%	22,8%			47,10%	20%
Program Perekonomian dan Pembangunan	491.233.200	390.842.100	941.484.800			223.902.370	212.169.640	416.336.748			45,58%	54,29%	44,22%			60,20%	45,50%

Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia sebagaimana tersaji pada **Tabel 2.2**

1. Rasio antara realisasi dan anggaran Bagian Organisasi dapat dikatakan kurang optimal dikarenakan gap / kesenjangan antara rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran cukup jauh. Hal ini disebabkan , proses transisi penerapan kebijakan pengadaan dan pembayaran pengadaan melalui *Inaproc* serta disebabkan kurangnya pengendalian teknis pada perencanaan dan penerapan anggaran kas

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aset Sekretariat Daerah Berdasarkan Kelompok Aset

No	Bagian	Jenis Aset					Total
		KIB A (Tanah)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB D (Jalan Irigasi dan Jaringan)	KIB E (Aset tetap lainnya)	
1	Organisasi	-	1.235.465.200	-	-	1.900.800	1.237.366.000
2	Umum	7.936.700.000	39.885.523.216	29.107.676.842,03		14.575.117.291,95	91.711.393.349,98
3	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	3.863.026.214	-	-	-	3.863.026.214
4	Tata Pemerintahan	1.537.903.984,69	1.315.089.769	-	-	-	2.852.993.753,69
5	Kesejahteraan Rakyat	-	1.030.260.300	88.030.000	-	-	1.118.290.300
6	Hukum	-	877.315.150	-	-	-	877.315.150
7	Perekonomian	-	1.057.011.780	-	-	-	1.057.011.780
8	Administrasi Pembangunan	-	10.243.641.600,54	-	-	-	10.243.641.600,54
9	Pengadaan Barang dan Jasa		1.874.702.669,86			5.000.000	1.879.702.669,86

Nilai aset tetap yang dimiliki/ dikuasai Sekretariat Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 :

Tabel 2.4
Nilai Aset Tetap Sekretariat Daerah

No	Bagian	Nilai Aset Tetap	Keterangan
1	Bagian Organisasi	Rp. 12.581.538.000,- (Terbilang : Dua belas Milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	
2	Bagian Umum dan Prokopim	Rp. 8.572.384.628.598,- (Terbilang : Delapan Triliyun Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan RibU lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah).	Bag. umum
		Rp. 3.863.026.214,- (Terbilang : Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Enam RibU Dua Ratus Empat Belas rupiah).	Bag. Prokopim
3	Bagian Tata Pemerintahan	Rp. 1.319.699.769 (Terbilang : Satu Milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)	
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 314.845.416,- (Terbilang : Tiga Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima RibU Empat Ratus Enam Belas Rupiah).	
5	Bagian Hukum	Rp. 877.315.150,00 (Terbilang delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)	
6	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Rp.1. 157.525.780,- (Terbilang : Satu milyar serratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)	Bag. Perekonomian

		Rp. 10.243.641.600,54,- (Terbilang : Sepuluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)	Bag. Adm. Pembangunan
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.879.702.669,86 (Terbilang : Satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh enam rupiah)	

Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat Daerah.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah sebanyak 103 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan dan Kelompok Jabatan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 2.5
SDM Sekretariat Daerah Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Bagian	Kelompok Jabatan				
		Ese 2	Ese 3	Ese 4	Fungsional	Staf/non eselon
1	Organisasi		1		8	6
2	Umum		1		3	98
3	Protokol dan Komunikasi		1	1	3	21

	Pimpinan					
4	Tata Pemerintahan	-	1	-	9	12
5	Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	4	11
6	Hukum	-	1	-	8	8
7	Perekonomian dan SDA	-	1	-	3	7
8	Administrasi Pembangunan	-	1	-	2	13
9	Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1	38	8

Tabel 2.6

SDM Sekretariat Daerah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Bagian	Kualifikasi Pendidikan					
		S-2	S-1 / D-4	D-3	SMA	SMP	SD
1	Organisasi	1	12		2		
2	Umum	1	25	11	52	9	4
3	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	12	2	9	0	1
4	Tata Pemerintahan	5	9		8		
5	Kesejahteraan Rakyat	1	12	-	4		1
6	Hukum		10	1	6		
7	Perekonomian		6		5		
8	Administrasi Pembangunan	1	7	1	7	-	-
9	Pengadaan Barang	0	41	1	5	0	0

	dan Jasa						
--	----------	--	--	--	--	--	--

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

A. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Jember relatif rendah dan stagnan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kualitas aspek perencanaan kinerja. Kurangnya kualitas aspek pengukuran kinerja. Yaitu belum terbangun system Pengukuran dan pengelolaan data kinerja berkala dalam kerangka mengendalikan capaian kinerja PD Kurangnya kualitas aspek evaluasi kinerja, belum memberikan feedback bagi perbaikan SAKIP Kurangnya kualitas aspek pelaporan kinerja, kurang dalam pemanfaatan laporan dalam perencanaan tahun berikutnya 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sinergitas antara Inspektorat, BAPPEDA dan Bagian Organisasi dalam penerapan kebijakan terkait SAKIP Mindset terkait SAKIP dipandang sebagai pemenuhan dokumen belum pada pemanfaatan dalam alokasi anggaran yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Peta proses bisnis belum sepenuhnya menggambarkan proses bisnis pencapaian visi dan misi.
2	Proses yang lama dalam mengumpulkan data oleh PD dalam penyusunan LPPD dan	Kurang responsifnya PD pengampu data urusan LPPD dan LKPJ dalam merevisi data hasil verifikasi Bagian Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan sistem pengumpulan data di internal PD pengampu data, sehingga memerlukan waktu

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
	LKPJ	pada Aplikasi E-LPPD dan E-LKPJ	<p>lama karena menunggu laporan dari bidang-bidang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksinkronan antara data permasalahan dan solusi. • Kurangnya pemahaman OPD bahwa permintaan data LPPD dan LKPJ dapat diisi dari dokumen evaluasi kinerja yang dimiliki PD
3	Belum meratanya kualitas Pelayanan publik pada unit pelayanan publik di kabupaten jember	Belum dilaksanakannya evaluasi pelayanan publik kepada seluruh unit pelayanan publik di Pemkab Jember	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana pada UPP belum terpenuhi sesuai standar UU No. 25 Th 2009 • Belum terintegrasinya pelayanan publik berbasis IT. • Belum optimalnya penerapan kebijakan terkait instrumen pengendalian dan evaluasi SOP. • Kurangnya pemenuhan kualitas sarpras pelayanan publik, terutama pada sarpras kelompok rentan • Kurang optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik. • Rendahnya tingkat inovasi pelayanan publik. • Kurangnya kepatuhan PD terhadap ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4	Rendahnya Hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang maksimalnya pemenuhan data dukung PD pengusul kebijakan dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 	1. Belum adanya kesamaan persepsi mengenai standar Kualitas Kebijakan oleh dari sisi analis kebijakan, PD penyusun kebijakan, dan Bagian Hukum sebagai

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>bagian yang memfasilitasi pengusulan kebijakan yang berupa produk hukum daerah</p> <p>2. Data Dukung yang kurang lengkap dan kurang sesuai dengan standar kebijakan yang baik sesuai pedoman penilaian IKK</p> <p>3. Kurangnya sosialisasi dan asistensi dari LAN secara intensif kepada Kabupaten/Kota dan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah</p>
5	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana kurang memadai • Jadwal Fasilitasi Kegamaan yang sering berubah <p>1. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam yang monoton bersifat rutin / seremonial dan kurang memberikan dampak terhadap kondusivitas kehidupan antar umat beragama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran untuk mencukupi sarana dan prasana yang diperlukan • Kurangnya sosialisasi kebijakan fasilitasi kegiatan keagamaan • Belum adanya system secara online yang mewadahi fasilitasi kegiatan keagamaan • Penyesuaian anggaran fasilitasi keagamaan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran • Kurangnya optimalnya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman , keimana dan ketakwaan umat beragama • Kurangnya sinergi antar <i>stakeholder</i> dalam membangun kondusivitas kehidupan antar umat beraga
6	Kebijakan Hibah yang diserahkan kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Lamanya proses fasilitasi kebijakan hibah yang bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat di sekretariat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kualitas SDM Verifikator lapangan sehingga berpengaruh terhadap percepatan proses

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya database yang valid terkait penerima hibah bidang keagamaan (lembaga pendidikan keagamaan, tempat ibadah) 	<p>penyaluran hibah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi kebijakan kepada penerima hibah • Keterbatasan anggaran yang dikhususkan untuk Hibah • Kebijakan hibah yang sering berubah ditengah Tahun Anggaran • Belum tersedianya sistem informasi terpadu berbasis online yang memudahkan penyusunan database penerima manfaat hibah
7	<p>Penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga, membutuhkan waktu yang lama</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ PD memiliki tingkat pemahaman yang belum memadai terhadap ketentuan Permendagri No. 22/2020 tentang tata cara kerja sama daerah. ○ Terdapat berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam memformulasikan rancangan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga. ○ Perangkat daerah belum sepenuhnya memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama sesuai prosedur yang diatur dalam Permendagri No. 22/2020. ○ Kekurangan pemahaman terhadap regulasi tersebut berdampak pada kualitas perjanjian kerja sama dan pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis yang sistematis tentang Permendagri No. 22/2020. • Bahasa aturan yang formal dan “padat” sehingga sulit dipahami bagi yang belum terbiasa membaca regulasi • banyaknya tahapan administrasi (nota kesepahaman, rancangan perjanjian, persetujuan DPRD dll) yang perlu diikuti. • Petugas teknis yang menangani kerja sama daerah belum memiliki kompetensi hukum atau manajemen proyek. • Tidak adanya <i>template</i> atau contoh kontrak naskah kerja sama yang sesuai Permendagri. PD cenderung “meniru” dokumen lama tanpa memastikan kesesuaian dengan aturan baru.

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
8	Belum updatenya peraturan Bupati mengenai delegasi wewenang Bupati pada Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati tentang delegasi wewenang Bupati kepada Camat belum diperbarui dan belum mengakomodir banyaknya regulasi baru, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan. 2. Kurangnya pedoman resmi menyebabkan perbedaan penafsiran wewenang antara Bupati, Camat, dan OPD terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya kajian kebutuhan administratif dan fungsional kecamatan sebagai dasar perubahan delegasi wewenang.
9	Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah	SDM yang ada belum memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi sesuai kebutuhan tugas di lapangan.	Kurangnya kriteria teknis dalam standar kompetensi jabatan untuk posisi operator pemetaan.
10	Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa terdapat banyak kendala sehingga tidak tepat waktu sesuai perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua pegawai PBJ memiliki sertifikasi atau pengalaman dalam pengadaan sesuai Perpres 12/2021. • Kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih bersifat ad hoc, belum mandiri, perlu peningkatan / kemandirian Unit Kerja PBJ secara permanen
		Belum optimalnya pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak ASN yang belum familiar menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau aplikasi e-Katalog LKPP. • Adanya kendala teknis seperti jaringan internet atau perangkat TIK yang belum memadai. • Kurangnya pemanfaatan LPSE oleh PD

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
11	Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember	Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none"> ○ Daya beli masyarakat yang menurun ○ Masih adanya kesenjangan ekonomi di Kabupaten Jember ○ Operasi pasar dan pasar murah yang dilakukan di Kabupaten Jember masih belum efektif
12	Masih adanya peredaran cukai ilegal di Kabupaten Jember	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap cukai ilegal	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum diketahuinya informasi tentang keberadaan cukai ilegal ● Masih adanya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember ● Operasi Bersama untuk memberantas cukai ilegal belum dilaksanakan secara efektif
13	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah relatif rendah	<p>Kurangnya pemenuhan komponen Kematangan Organisasi Berdasarkan Permendagri 99 tahun 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perencanaan Pembangunan Daerah ● Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas ● Penjaminan Mutu Layanan Daerah ● Standar Operasional Prosedur (SOP) ● Diklat Aparatur ● Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas ● Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja ● Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur ● Pengukuran Kinerja Daerah: ● Pengembangan Inovasi Layanan Budaya Organisasi 	Kurangnya sinergi PD koordinator penanggungjawab aspek penilaian kematangan organisasi dalam pendampingan dan penerapan regulasi yang mengatur setiap aspek

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
14	Penerapan Reformasi Birokrasi belum cukup berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat	Rencana aksi yang disusun belum mencakup pemecahan akar masalah kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mindset/</i> pola pikir/ pemahaman sebagian besar aparatur terkait reformasi birokrasi yang dipandang hanya merupakan tugas fungsi dan kegiatan PD tertentu. • Kurangnya sinergitas antara PD penanggung jawab aspek RB
15	Kurang Optimalnya Reformasi Hukum pada aspek transparansi dan publikasi dokumentasi produk hukum, khususnya implementasi Aplikasi Web JDIH Kabupaten Jember	Aplikasi JDIH dalam proses pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi JDIH yang dibangun sebelumnya terkendala terkait manajemen internal Diskominfo. • Saat ini dalam proses pengembangan Aplikasi JDIH baru menggunakan SDM dari internal Bagian Hukum. • Memerlukan waktu relatif lama terkait proses pendokumentasian produk hukum secara digital. • Dan selanjutnya perlu dilakukan sinkronisasi dan persetujuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk dapat disebarluaskan melalui web secara massif.
17	Kurang optimalnya aspek Reformasi Hukum pada proses <i>legal drafting</i> Produk Hukum	Lamanya proses fasilitasi <i>legal drafting</i> Usulan pengajuan produk hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Proses usulan produk hukum dari PD pengusul yang tidak sesuai SOP Bagian Hukum karena perlu kelengkapan dokumen dari PD pengusul

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

2. Pelayanan publik yang belum optimal

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut adalah sebagaimana berikut :

Gambar 2.1 Misi RPJMD Kabupaten Jember 2025-2029



Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; *Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik*

Gambar 2.2
Logical Framework Misi 3 RPJMD 2025-2029

MISI 3	MEMBANGUN BIROKRASI YANG PROFESIONAL, HUMANIS DAN MELAYANI SERTA PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK						
TUJUAN	TERWUJUDNYA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INOVATIF						
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)						
SASARAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN ASN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN INOVATIF.	MENINGKATNYA DIGITALISASI PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA INTEGRITAS PEMERINTAHAN		
INDIKATOR SASARAN	SAKIP	OPINI BPK	SISTEM MERIT	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)	INDEKS INOVASI DAERAH	INDEKS SPBE*	SPI
URUSAN UTAMA	SETDA	KEUANGAN	KEPEGAWAIAN	SETDA	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KOMUNIKASI INFORMATIKA	INSPEKTORAT DAERAH
URUSAN PENDUKUNG	PERENCANAAN			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		STATISTIK	
	INSPEKTORAT DAERAH			PENANAMAN MODAL		PERSANDIAN	
				KECAMATAN			
				KESEHATAN			

Berdasarkan logical Framework Misi 3, tujuan pada RPJMD yang akan didukung oleh Sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah

Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif. dengan **sasaran RPJMD** :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
 - Dalam mendukung sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan”, Sekretariat daerah sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian kebijakan peningkatan kinerja. Dalam hal ini Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan memiliki peran dalam menunjang akuntabilitas kinerja daerah pada Aspek pelaporan kinerja. Dalam menunjang sasaran RPJMD, terdapat ***crosscutting kinerja*** dengan Bappeda yang menunjang akuntabilitas kinerja pada aspek perencanaan dan pengukuran, serta kinerja Inspektorat yang menunjang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada aspek evaluasi internal .
 - Dalam mendukung sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan”, Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berperan dalam menunjang akuntabilitas keuangan, pada aspek kebijakan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh PD. Terdapat ***crosscutting kinerja*** dengan BPKAD dan Inspektorat, dalam rangka mencapai opini BPK dan memantau tindaklanjut hasil rekomendasi BPK
 - Dalam mendukung sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan”, Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi berperan dalam penyusunan analisis jabatan yang menjadi salah satu pedoman dalam penerapan merit sistem. Terdapat ***crosscutting kinerja*** dengan BKPSDM dalam hal penerapan hasil analisis jabatan sebagai salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam penerapan merit sistem
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
Dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, sekretariat Daerah berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan publik. Terdapat “***Crosscutting kinerja*** dengan beberapa perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Kesehatan yang mendukung kinerja kabupaten yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Jember dirumuskan **Tujuan pada Renstra Sekretariat Daerah** adalah : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Prima” dengan Indikator tujuan: Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai SAKIP Kabupaten.

Atas dasar tujuan Renstra Sekretariat Daerah tersebut ditetapkan **Sasaran pada Renstra Sekretariat Daerah** sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja dan Pelayanan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Efektivitas Pencapaian Target kinerja Sekretariat Daerah

Tabel 2.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Misi ke 3 Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif ,inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • penyederhanaan struktur organisasi sesuai kebijakan pemerintah pusat sudah terlaksana 100% • tahapan penyederhanaan struktur dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah telah terlaksana • pemantauan terhadap kematangan organisasi telah dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • proses bisnis pasca penyederhanaan struktur organisasi belum diimplementasikan • Pelayanan berbasis digital belum optimal, dimana banyak aplikasi yang dikembangkan PD belum terintegrasi antar pelayanan dan belum memudahkan masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis penyusunan analisis jabatan • Terlaksananya analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai pedoman yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis jabatan belum sepenuhnya dapat diterapkan dikarenakan besarnya gap/ kesenjangan antara kompetensi teknis, kualifikasi pendidikan dengan beban kerja yang diemban setiap personil

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pencapaian target kinerja yang harus dicapai oleh PD melalui Perjanjian Kinerja • Tertibnya penyampaian pelaporan kinerja sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemanfaatan Perjanjian Kinerja sebagai sarana penilaian capaian kinerja hingga ke level jabatan terendah • Pelaporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja dan perencanaan kinerja berikutnya • Belum tersediainya aplikasi SAKIP yang mengintegrasikan seluruh aspek SAKIP dan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan
		Telah tersedia kebijakan petunjuk teknis penerapan Budaya ASN Berakhlak	Internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK bersifat formal belum memantau penerapan nilai nilai individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya standar pelayanan (SP) dan SOP pelayanan publik Perangkat Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan layanan • Publikasi SOP dan SP melalui media sosial dan web resmi Perangkat daerah serta di ruang pelayanan • Tersedia sarana pengukuran kepuasan masyarakat secara elektronik (e-SUKMA) • Tersedianya sarana publikasi secara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalokasian anggaran sarana dan prasarana pelayanan publik belum menjadi prioritas setiap UPP • Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan sepenuhnya diterapkan oleh pelaksana pelayanan • Hasil Survey Kepuasan masyarakat belum sepenuhnya digunakan untuk melakukan perbaikan pelayanan
		Implementasi aspek Reformasi Birokrasi general maupun tematik sudah ditetapkan dalam suatu kebijakan formal pemkab Jember	Rencana aksi reformasi birokrasi yang dirumuskan PD belum sepenuhnya berbasis permasalahan mendasar berdasarkan strategis yang riil
		Menyediakan landasan hukum (Regulasi Nasional (Perpres 12/2021, Permen dan SOP) yang jelas untuk pelaksanaan PBJ secara akuntabel dan efisien.	Tingkat Pemahaman OPD terhadap Prosedur PBJ Masih Rendah sehingga Sering terjadi keterlambatan atau kesalahan dokumen karena kurangnya pemahaman dari pihak pengguna
		Implementasi Sistem e-Procurement (SPSE) yang Mempermudah proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan efisiensi	Kurangnya Dukungan Teknologi dan Infrastruktur sehingga Sistem pengadaan berbasis elektronik kadang belum optimal karena jaringan, perangkat, atau kapasitas sistem

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<p>Dengan Adanya beberapa Jabatan Fungsional PPBJ dapat mendukung profesionalisme dan pengembangan karier SDM pengadaan.</p>	<p>Tingginya Beban Kerja Personel yang Ada sehingga Sedikitnya jumlah PPBJ menyebabkan beban kerja tidak seimbang dan berdampak pada kualitas layanan dan berdampak Kekurangan Jumlah PPBJ dan Kompetensi SDM Pengadaan.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen SDM dalam memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan baik. • Adanya struktur organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpengaruh dalam hal teknis pelaksanaan Kegiatan. • target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD terutama dalam hal pelaksanaan fasilitasi keagamaan yang harus tercapai di tahun anggaran berjalan • Perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kegiatan rutin keagamaan setiap tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam hal pelayanan • Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap kegiatan keagamaan serta hibah kepada masyarakat • Belum tersedianya system secara online untuk menampung fasilitasi kegiatan keagamaan • Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya anggaran pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember setiap tahun • Adanya struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur • tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember • Adanya target dan indikator kinerja yang harus dicapai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komitmen PD pengampu urusan LKPJ dan LPPD dalam memenuhi data dicerminkan dari lamanya waktu pengiriman dan tidak optimalnya data yang dikirimkan. • Belum semua dokumen kerja sama daerah yang diterbitkan dimanfaatkan secara optimal • Perangkat daerah memiliki tingkat pemahaman yang belum memadai terhadap ketentuan Permendagri No. 22/20 tentang tata cara kerja sama daerah. • Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah.

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<p>oleh Bagian Tata Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya penggunaan teknologi informasi berupa e-LKPJ, e-LPPD, dan aplikasi kerja sama melalui web <i>tapem.jemberkab.go.id</i> 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Jember setiap tahun • Adanya struktur organisasi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Perekonomian dan administrasi pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang perekonomian dan administrasi pembangunan • Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan • Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan • Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban
	Misi ke 3 Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam memenuhi data dukung dalam setiap perkara litigasi yang dilakukan pendampingan oleh Bagian Hukum. • Tidak adanya sumber daya manusia

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif ,inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	<p>SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya target kinerja/ indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh Bagian Hukum Kabupaten Jember dan didukung anggaran yang memadai • Penggunaan teknologi informasi berupa website JDIIH 	<p>pada perangkat daerah yang memahami legal drafting produk hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat daerah tidak berperan secara aktif dalam mengajukan produk hukum mereka. • Keterbatasan operator website JDIIH serta sering terdapat banyak permasalahan dalam website tersebut dalam memaksimalkan dokumentasi produk hukum.

C. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Pemerintah Provinsi

C.1. Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian/ Lembaga

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Penyederhanaan struktur organisasi Perangkat daerah telah dilakukan sesuai proses bisnis pencapaian visi dan misi bupati terpilih tetapi belum didukung dengan SPBE terintegratif	<ul style="list-style-type: none"> • penyederhanaan struktur organisasi sesuai kebijakan pemerintah pusat sudah terlaksana 100% • tahapan penyederhanaan struktur dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah telah 	<ul style="list-style-type: none"> • proses bisnis pasca penyederhanaan struktur organisasi belum ditindaklanjuti dalam SPBE • SPBE belum optimal, dimana banyak aplikasi dikembangkan secara parsial oleh PD, belum terintegrasi dan tidak berbasis peta proses bisnis pencapaian tujuan dan sasaran

		terlaksana	
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Kurang Optimalnya pemanfaatan hasil analisis jabatan dalam manajemen kepegawaian ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis penyusunan analisis jabatan • Terlaksananya analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai pedoman yang ada 	Besarnya gap/kesenjangan antara kompetensi teknis, kualifikasi pendidikan dalam menyelesaikan beban kerja
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Rendahnya tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pencapaian target kinerja yang harus dicapai oleh PD melalui Perjanjian Kinerja • penyampaian pelaporan kinerja sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemanfaatan Perjanjian Kinerja sebagai sarana penilaian capaian kinerja hingga ke level jabatan terendah • Pelaporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja dan perencanaan kinerja berikutnya • Belum tersedianya aplikasi SAKIP untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi hingga individu sampai level jabatan terendah, dan belum mengintegrasikan seluruh aspek SAKIP dan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Kurang optimalnya internalisasi Budaya ASN BerAKHLAK	Telah tersedia kebijakan petunjuk teknis penerapan Budaya ASN Berakhlak	Internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK bersifat formal belum memantau penerapan nilai-nilai individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Kurang meratanya kualitas pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya standar pelayanan (SP) dan SOP pelayanan publik Perangkat Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan layanan • Publikasi SOP dan SP melalui media sosial dan web resmi Perangkat daerah serta di ruang pelayanan • Tersedia sarana pengukuran kepuasan masyarakat secara elektronik (e-SUKMA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalokasian anggaran sarana dan prasarana pelayanan publik belum menjadi prioritas setiap UPP • Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan sepenuhnya diterapkan oleh pelaksana pelayanan • Hasil Survey Kepuasan masyarakat belum sepenuhnya digunakan untuk melakukan perbaikan pelayanan
Sasaran Strategis 6: Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Kurangnya sinergitas Perangkat daerah Pengampu Aspek Pendukung Reformasi Birokrasi	Implementasi aspek Reformasi Birokrasi general maupun tematik sudah ditetapkan dalam suatu kebijakan formal pemkab Jember	Rencana aksi reformasi birokrasi yang dirumuskan PD belum sepenuhnya berbasis permasalahan mendasar berdasarkan isu strategis yang riil

C.2. Telaahan Renstra Pemerintah Provinsi

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Rendahnya tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pencapaian target kinerja yang harus dicapai oleh PD melalui Perjanjian Kinerja • penyampaian pelaporan kinerja sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemanfaatan Perjanjian Kinerja sebagai sarana penilaian capaian kinerja hingga ke level jabatan terendah • Pelaporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja dan perencanaan kinerja berikutnya • Belum tersedianya aplikasi SAKIP untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi hingga individu sampai level jabatan terendah, dan belum mengintegrasikan seluruh aspek SAKIP dan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Belum optimalnya pemanfaatan PD terhadap hasil survey kepuasan masyarakat sebagai feedback perbaikan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya sarana pengukuran kepuasan masyarakat berbasis elektronik (E-SUKMA) • Telah tersedia kebijakan pelaporan IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya pengisian E-SUKMA • Masih banyaknya masyarakat pengguna layanan yang awam dan kesulitan untuk pengisiannya

		• Telah dilakukan pembinaan kepada PD	
--	--	---------------------------------------	--

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

D.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab Jember No 1 Tahun 2015 tentang tata ruang wilayah Kab Jember Tahun 2015 – 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah Visi penataan ruang Kabupaten Jember adalah terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan 6 misi penataan ruang Kabupaten Jember adalah mewujudkan :

Dengan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Tabel 2.11

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lembaga perangkat daerah yang efektif, tepat fungsi, tepat ukuran dan tidak tumpang tindih tupoksi, dalam rangka mendukung terwujudnya penataan ruang dan wilayah • Tersedianya perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen mendukung terwujudnya tata ruang, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemanfaatan Perjanjian Kinerja sebagai sarana penilaian capaian kinerja hingga ke level jabatan terendah • Pelaporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja dan perencanaan kinerja berikutnya • Belum tersedianya aplikasi SAKIP untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi hingga individu sampai level jabatan terendah, dan belum mengintegrasikan seluruh aspek SAKIP dan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Pada dasarnya Sekretariat Daerah yang memiliki tugas fungsi mengkoordinasikan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan berupaya dalam optimalisasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendukung semua sektor.

D.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Sasaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Jember adalah memastikan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana, kebijakan, dan program daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya lembaga perangkat daerah yang efektif, tepat fungsi, tepat ukuran dan tidak tumpang tindih tupoksi, dalam rangka mendukung terwujudnya penataan ruang dan wilayah Tersedianya perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen mendukung terwujudnya tata ruang, 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemanfaatan Perjanjian Kinerja sebagai sarana penilaian capaian kinerja hingga ke level jabatan terendah Pelaporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam evaluasi kinerja dan perencanaan kinerja berikutnya Belum tersedianya aplikasi SAKIP untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi hingga individu sampai level jabatan terendah, dan belum mengintegrasikan

			seluruh aspek SAKIP dan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan
--	--	--	---

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	
		Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”** Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah termasuk dalam Misi ke-3 yakni Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif ,inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, dan Pelayanan Publik Yang Prima		Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)	73,00	75,00	81,00	81,10	81,20
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,63	4,64	4,65	4,66	4,67
2		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,34	86,78	87,23	87,67	88,12
3		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah Yang didampingi dan mendapatkan Nilai SAKIP Minimal A (%)	50	60	70	80	85
4		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (Nilai)	81	82	83	84	85

Gambar 3.1 Logical Framework Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



TUJUAN

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima

1. Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)

2. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)

SASARAN

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Pemerintah daerah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penerapan SAKIP Perangkat Daerah

Persentase PD Didampingi dan Mendapatkan Nilai SAKIP Minimal BB

PROGRAM



BAGIAN PENGAMPU



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju			
MISI III : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif ,inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang mendukung efisiensi dan efektifitas	Optimalisasi sistem pengadaan barang/jasa yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung efisiensi anggaran dan efektivitas pelayanan publik
		Meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	Meningkatkan infrastruktur dan tata kelola SPSE yang andal, terintegrasi, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna guna mendukung pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM • Meningkatkan level kematangan kelembagaan UKPBJ yang transparan dan akuntabel • Meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa
		Mewujudkan Pelayanan Public Yang Prima Sesuai Tuntutan Dan Kebutuhan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan Kepatuhan Unit Pelayanan Publik (UPP) Terhadap UU No 25 Tahun 2009 ○ Penguatan Tata Laksana dalam penyelenggaraan Pelayanan publik ○ Fasilitasi dan pemantauan pemenuhan kualitas sarana prasarana pelayanan publik
		Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan akuntabilitas Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penataan Kelembagaan sesuai ketentuan perundang undangan, dan mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah ○ Meningkatkan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ○ Meningkatkan Kualitas dan penerapan Analisis Jabatan ○ Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD melalui pemanfaatan pelaporan kinerja dalam perbaikan SAKIP
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dan Keprotokolan	Melaksanakan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Melaksanakan fasilitasi

			kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pemenuhan dan pencapaian indikator dalam LPPD, SPM, dan LKPJ • Meningkatkan Efektifitas Kerja Sama Daerah • Meningkatkan penegasan batas wilayah Kelurahan di Kabupaten Jember • Meningkatkan kualitas penataan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi dan pendampingan pemenuhan data LPPD, SPM, dan LKPJ • Melaksanakan evaluasi capaian kinerja LPPD dan SPM pada sistem aplikasi • Melaksanakan fasilitasi usulan kerja sama daerah dan monitoring kerja sama daerah • Melaksanakan pemenuhan tahapan penyusunan Peraturan Bupati tentang batas wilayah Kelurahan di Kabupaten Jember • Menyusun bahan rekomendasi kebijakan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat, 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan Fasilitasi, kebijakan di bidang Bina mental, kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan sosial • Meningkatkan fasilitasi dan pelayanan administrasi penyaluran hibah
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan kebijakan perekonomian dan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perekonomian • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD • Melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembangunan • Melaksanakan fasilitasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Produk Hukum Yang Berkualitas dan Tepat Sasaran • Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang hukum • Meningkatkan Desa/ Kelurahan Serta Masyarakat Yang Sadar Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Usulan Perda Dari DPRD Dilihat dari Keperluan Masyarakat; • Peningkatan Fasilitasi; kualitas Produk Hukum; • Meningkatkan Pelayanan fasilitasi penetapan Produk Hukum. • Peningkatan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum • Meningkatnya Indeks Kepuasan atas Layanan Bantuan Hukum; Litigasi dan

			<p>non Litigasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Dokumentasi Produk Hukum Daerah; dan kemudahan akses terhadap Dokumentasi Produk Hukum Daerah
--	--	--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Sekretariat Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima				- Nilai SAKIP Kabupaten (nilai) - Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)		
			Meningkatnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			daerah Bagian Tata Pemerintahan		4. Nilai SAKIP Bagian Tata Pemerintahan 5. Persentase keterisian IKK-LPPD		
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
						Kantor	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					sesuai ketentuan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Dipelihara/Direhabilitasi	Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan ketentuan	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen LPPD sesuai ketentuan	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya efektivitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Hukum		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN 4. Nilai SAKIP Bagian Hukum	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bagian Hukum
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				kepegawaian dan peningkatan kapasitas Pegawai ASN	peningkatan kapasitas pegawai ASN	Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					(Laporan)		
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya efektivitas,		1.Persentase indikator	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Bagian Kesejahtera

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat		program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks profesionalitas ASN 4. Nilai SAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	an Rakyat
				Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				ASN			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Tamu (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					(Laporan)		
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya efektivitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Bagian	1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN 4. Nilai SAKIP Bagian	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bagian Organisasi

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Organisasi		Organisasi 5. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Kematangan Organisasi Kategori Tinggi (%) 6. Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Area Pelaporan (angka)		
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					RKA-SKPD (Dokumen)		
				Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Undangan (Orang)		
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Penataan organisasi	Persentase dokumen penataan organisasi yang terselesaikan	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				yang efektif dan efisien	sesuai ketentuan		
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			Meningkatnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN 4. Nilai SAKIP Bagian Umum, Protokol dan	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Pimpinan		Komunikasi Pimpinan		
				Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase administrasi BMD sesuai ketentuan	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					(Dokumen)		
				Meningkatnya pemenuhan administrasi dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					(Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				ketentuan	sesuai ketentuan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Pemerintahan Daerah	dan siap pakai	Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					(Unit)		
				Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan Setda yang terfasilitasi	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
				Meningkatnya Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya efektivitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN 4. Nilai SAKIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi dan kepegawaian dan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				peningkatan kapasitas pegawai ASN	pegawai ASN		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN 4. Nilai SAKIP Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kebijakan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Meningkatnya efektivitas Kerja Sama Daerah bidang	Persentase kebijakan kerjasama daerah bidang Kesejahteraan	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Kesejahteraan Rakyat	rakyat yang ditindaklanjuti		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti (%) 2. Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitas 3. Persentase pemenuhan tahapan penyusunan peraturan bupati penegasan batas wilayah kelurahan di kabupaten Jember		Bagian Tata Pemerintahan
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Meningkatnya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan Kerjasama Daerah Yang ditindaklanjuti	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum dan pendokumentasian produk hukum yang		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Hukum

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			dilaksanakan				
				Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyusunan produk hukum dan bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum yang difasilitasi	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Angka) 2. Tingkat Inflasi	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
				Meningkatnya Koordinasi,	Persentase kebijakan perekonomian yang	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Pemantauan dan evaluasi serta pembinaan kebijakan perekonomian	ditindaklanjuti		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya fasilitasi administrasi pembangunan	Persentase pedoman administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Meningkatnya pemantauan kebijakan sumber daya alam	Persentase hasil pemantauan Sumberdaya alam yang ditindaklanjuti	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		1. Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks) 2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Angka)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan akuntabel	Persentase kebijakan pengelolaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Barang dan Jasa (Dokumen)	Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				136.710.560.592,18		153.956.924.359,21		159.413.349.828,5		173.920.397.369,94		184.824.551.233,98		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4			68.738.879.541,73		82.695.185.883,21		88.814.810.623,5		95.579.212.483,94		102.728.741.500,98		
Meningkatnya efektivitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	85,8	86,6	996.619.070,92	87	1.994.906.721	87,2	1.994.906.721	87,5	2.144.906.721	87,9	2.144.906.721	4.01.0.00.000.01.0008 - Bagian Tata Pemerintahan	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	39	76		77		78		79		80			
	Indeks Profesionalitas	77,2	79,2		80,2		81,2		82,2		83,2			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	ASN (Indeks)													
	Nilai SAKIP Bag. Tata Pemerintahan	68,22	81,5		82		82,5		83		83,5			
	Persentase keterisian IKK LPPD sesuai pedoman (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.848.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Tata Pemerintahan	
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	100%	100%	11.848.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000		
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.648.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen	4	4	3.648.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.100.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.100.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.100.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	2	2	4.100.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				390.312.070,92		604.564.490		604.564.490		604.564.490		604.564.490		
Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	390.312.070,92	100%	604.564.490	100%	604.564.490	100%	604.564.490	100%	604.564.490		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				390.312.070,92		604.564.490		604.564.490		604.564.490		604.564.490		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12	12	390.312.070,92	12	604.564.490	12	604.564.490	12	604.564.490	12	604.564.490		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	100%	0	0	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat				268.364.400		574.261.380		574.261.380		574.261.380		574.261.380		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	100%	100%	268.364.400	100%	574.261.380	100%	574.261.380	100%	574.261.380	100%	574.261.380		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.430.800		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	12.430.800	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		3.547.000		3.547.000		3.547.000		3.547.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0	12	3.547.000	12	3.547.000	12	3.547.000	12	3.547.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	(Paket)													
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.649.100		17.427.000		17.427.000		17.427.000		17.427.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	2	9.649.100	5	17.427.000	5	17.427.000	5	17.427.000	5	17.427.000		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				13.704.500		60.651.380		60.651.380		60.651.380		60.651.380		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	3	13.704.500	8	60.651.380	8	60.651.380	8	60.651.380	8	60.651.380		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				232.580.000		442.636.000		442.636.000		442.636.000		442.636.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	232.580.000	12	442.636.000	12	442.636.000	12	442.636.000	12	442.636.000		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		157.710.851		157.710.851		157.710.851		157.710.851		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan	100%	0	0	100%	157.710.851	100%	157.710.851	100%	157.710.851	100%	157.710.851		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		103.344.641		103.344.641		103.344.641		103.344.641		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	0	0	5	103.344.641	5	103.344.641	5	103.344.641	5	103.344.641		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		54.366.210		54.366.210		54.366.210		54.366.210		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0	2	54.366.210	2	54.366.210	2	54.366.210	2	54.366.210		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				214.120.000		214.120.000		214.120.000		214.120.000		214.120.000		
Meningkatnya fasilitas Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan Kebutuhan	100%	100%	214.120.000	100%	214.120.000	100%	214.120.000	100%	214.120.000	100%	214.120.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan													
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				214.120.000		214.120.000		214.120.000		214.120.000		214.120.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	214.120.000	12	214.120.000	12	214.120.000	12	214.120.000	12	214.120.000		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.500.000		103.250.000		103.250.000		103.250.000		103.250.000		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik Daerah	100%	100%	70.500.000	100%	103.250.000	100%	103.250.000	100%	103.250.000	100%	103.250.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai													
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.500.000		48.250.000		48.250.000		48.250.000		48.250.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	38.500.000	8	48.250.000	8	48.250.000	8	48.250.000	8	48.250.000		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	5	12.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	2	20.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0		0		0		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan		0	0	0	0	0	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan													
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			0		0		0			150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		0	0	0	0	0	0	6	150.000.000	6	150.000.000		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				41.474.600		291.000.000		291.000.000		291.000.000		291.000.000		
Meningkatnya kualitas Laporan	Persentase penyelesaian	100%	100%	41.474.600	100%	291.000.000	100%	291.000.000	100%	291.000.000	100%	291.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	dokumen LPPD sesuai ketentuan													
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				41.474.600		291.000.000		291.000.000		291.000.000		291.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	3	3	41.474.600	3	291.000.000	3	291.000.000	3	291.000.000	3	291.000.000		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Hukum	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	78	82	626.845.107	84	1.954.541.057	85	1.954.541.057	86	1.954.541.057	87	1.954.541.057	4.01.0.00.00.01.0001 - Bagian Hukum	
	Persentase Realisasi	97	97,5		97,7		97,9		98		98,2			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Anggaran (%)													
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,2	79,2		80,2		81,2		82,2		83,2			
	Nilai SAKIP Bagian Hukum	69,05	81,5		82		82,5		83		83,5			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.660.000		1.954.800		1.954.800		1.954.800		1.954.800		
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan		100%	2.660.000	100%	1.954.800	100%	1.954.800	100%	1.954.800	100%	1.954.800		
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%		665.000		488.700		488.700		488.700		488.700		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	7	1	665.000	1	488.700	1	488.700	1	488.700	1	488.700		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				665.000		488.700		488.700		488.700		488.700		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7	1	665.000	1	488.700	1	488.700	1	488.700	1	488.700		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				665.000		488.700		488.700		488.700		488.700		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7	1	665.000	1	488.700	1	488.700	1	488.700	1	488.700		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				665.000		488.700		488.700		488.700		488.700		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7	1	665.000	1	488.700	1	488.700	1	488.700	1	488.700		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				90.180.000		114.480.000		114.480.000		114.480.000		114.480.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	90.180.000	100%	114.480.000	100%	114.480.000	100%	114.480.000	100%	114.480.000		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				90.180.000		114.480.000		114.480.000		114.480.000		114.480.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	90.180.000	12	114.480.000	12	114.480.000	12	114.480.000	12	114.480.000		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				45.000.000		98.742.000		98.742.000		98.742.000		98.742.000		
Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	100%	45.000.000	100%	98.742.000	100%	98.742.000	100%	98.742.000	100%	98.742.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
dan peningkatan kapasitas ASN	dan peningkatan kapasitas pegawai ASN													
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				45.000.000		98.742.000		98.742.000		98.742.000		98.742.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	2	45.000.000	6	98.742.000	6	98.742.000	6	98.742.000	6	98.742.000		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				335.773.900		1.231.213.900		1.231.213.900		1.231.213.900		1.231.213.900		
Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	100%	100%	335.773.900	100%	1.231.213.900	100%	1.231.213.900	100%	1.231.213.900	100%	1.231.213.900		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan				54.368.200		402.744.500		402.744.500		402.744.500		402.744.500		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	2	54.368.200	5	402.744.500	5	402.744.500	5	402.744.500	5	402.744.500		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.499.100		12.375.000		12.375.000		12.375.000		12.375.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	1	5.499.100	1	12.375.000	1	12.375.000	1	12.375.000	1	12.375.000		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				111.989.500		245.414.200		245.414.200		245.414.200		245.414.200		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6	111.989.500	6	245.414.200	6	245.414.200	6	245.414.200	6	245.414.200		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.177.100		69.600.200		69.600.200		69.600.200		69.600.200		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	12.177.100	1	69.600.200	1	69.600.200	1	69.600.200	1	69.600.200		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				151.740.000		501.080.000		501.080.000		501.080.000		501.080.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2	151.740.000	2	501.080.000	2	501.080.000	2	501.080.000	2	501.080.000		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				113.308.807		433.150.357		433.150.357		433.150.357		433.150.357		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah														
Meningkatnya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	113.308.807	100%	433.150.357	100%	433.150.357	100%	433.150.357	100%	433.150.357		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.440.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	1	3.440.000	1	9.300.000	1	9.300.000	1	9.300.000	1	9.300.000		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.601.207		13.600.357		13.600.357		13.600.357		13.600.357		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	2	13.601.207	2	13.600.357	2	13.600.357	2	13.600.357	2	13.600.357		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				96.267.600		410.250.000		410.250.000		410.250.000		410.250.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4	96.267.600	8	410.250.000	8	410.250.000	8	410.250.000	8	410.250.000		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.922.400		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik Daerah	100%	100%	39.922.400	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai													
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.705.200		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	16.705.200	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				6.217.200		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	6	6.217.200	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	95	17.000.000	95	25.000.000	95	25.000.000	95	25.000.000	95	25.000.000		
Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	88,13	91	893.893.100	91,5	1.404.349.262	92	1.474.566.725	92,5	1.548.295.063	93	1.625.709.814	4.01.0.00.00.01.0003 - Bagian Kesejahter	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemerintahan Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat													aan Rakyat	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	43,7	78,5		81,5		84,5		87,5		91,5			
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,2	79,2		80,2		81,2		82,2		83,2			
	Nilai SAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat	73,52	81,5		82		82,5		83		83,5			
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				168.960.000		186.278.400		195.592.320		205.371.936		215.640.533		
Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	168.960.000	100%	186.278.400	100%	195.592.320	100%	205.371.936	100%	215.640.533		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				168.960.000		186.278.400		195.592.320		205.371.936		215.640.533		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	168.960.000	12	186.278.400	12	195.592.320	12	205.371.936	12	215.640.533		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.500.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781		
Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	100%	100%	38.500.000	100%	47.250.000	100%	49.612.500	100%	52.093.125	100%	54.697.781		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut				38.500.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	22	22	38.500.000	22	47.250.000	22	49.612.500	22	52.093.125	22	54.697.781		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				414.318.200		733.098.579		769.753.507		808.241.183		848.653.243		
Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	100%	100%	414.318.200	100%	733.098.579	100%	769.753.507	100%	808.241.183	100%	848.653.243		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.379.700		175.463.978		184.237.176		193.449.035		203.121.487		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	70.379.700	12	175.463.978	12	184.237.176	12	193.449.035	12	203.121.487		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	(Paket)													
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.604.200		134.168.693		140.877.128		147.920.984		155.317.034		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	48.604.200	12	134.168.693	12	140.877.128	12	147.920.984	12	155.317.034		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.936.300		32.525.183		34.151.442		35.859.015		37.651.965		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	21.936.300	12	32.525.183	12	34.151.442	12	35.859.015	12	37.651.965		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.050.000		68.250.000		71.662.500		75.245.625		79.007.906		
Terlaksananya Fasilitas	Jumlah Laporan Fasilitas	12	12	10.050.000	12	68.250.000	12	71.662.500	12	75.245.625	12	79.007.906		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu (Laporan)													
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				263.348.000		322.690.725		338.825.261		355.766.524		373.554.851		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	263.348.000	12	322.690.725	12	338.825.261	12	355.766.524	12	373.554.851		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		106.050.000		111.352.500		116.920.125		122.766.131		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan	100%	0	0	100%	106.050.000	100%	111.352.500	100%	116.920.125	100%	122.766.131		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan													
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		106.050.000		111.352.500		116.920.125		122.766.131		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	0	5	106.050.000	5	111.352.500	5	116.920.125	5	122.766.131		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.523.100		199.547.250		209.524.613		220.000.844		231.000.885		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	147.523.100	100%	199.547.250	100%	209.524.613	100%	220.000.844	100%	231.000.885		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa				10.000.000		22.160.250		23.268.263		24.431.676		25.653.259		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	10.000.000	12	22.160.250	12	23.268.263	12	24.431.676	12	25.653.259		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				22.800.000		25.137.000		26.393.850		27.713.543		29.099.220		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	22.800.000	12	25.137.000	12	26.393.850	12	27.713.543	12	29.099.220		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				114.723.100		152.250.000		159.862.500		167.855.625		176.248.406		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan	12	12	114.723.100	12	152.250.000	12	159.862.500	12	167.855.625	12	176.248.406		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)													
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.591.800		132.125.033		138.731.285		145.667.850		152.951.241		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	100%	100%	124.591.800	100%	132.125.033	100%	138.731.285	100%	145.667.850	100%	152.951.241		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan				73.183.200		77.000.033		80.850.035		84.892.537		89.137.163		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	73.183.200	9	77.000.033	9	80.850.035	9	84.892.537	9	89.137.163		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.408.600		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	50	51.408.600	50	55.125.000	51	57.881.250	55	60.775.313	55	63.814.078		
meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Organisasi	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	80	82	1.120.372.010	83	2.671.220.000	84	2.681.905.000	85	2.692.633.000	86	2.703.405.000	4.01.0.00.00.01.0004 - Bagian Organisasi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember														
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	53	90		90		90		90		90			
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,2	79,2		80,2		81,2		82,2		83,2			
	Nilai SAKIP Bagian Organisasi	82,22	82,75		83		83,5		83,75		84			
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kematangan organisasi kategori tinggi (%)	5,5	8,2		9,6		10,9		12,3		13			
	Rata rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Area Pelaporan (Angka)	12,37	12,87		12,3		12,5		12,75		13			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.870.800		16.135.000		16.199.000		16.264.000		16.328.000		
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	100%	100%	3.870.800	100%	16.135.000	100%	16.199.000	100%	16.264.000	100%	16.328.000		
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.918.100		7.765.000		7.796.000		7.827.000		7.858.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2	1.918.100	2	7.765.000	2	7.796.000	2	7.827.000	2	7.858.000		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan				1.952.700		8.370.000		8.403.000		8.437.000		8.470.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2	1.952.700	2	8.370.000	2	8.403.000	2	8.437.000	2	8.470.000		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				289.253.024		621.088.000		623.573.000		626.070.000		628.575.000		
Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	289.253.024	100%	621.088.000	100%	623.573.000	100%	626.070.000	100%	628.575.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				289.253.024		621.088.000		623.573.000		626.070.000		628.575.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	289.253.024	12	621.088.000	12	623.573.000	12	626.070.000	12	628.575.000		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				34.000.000		23.193.000		23.287.000		23.381.000		23.476.000		
Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	100%	100%	34.000.000	100%	23.193.000	100%	23.287.000	100%	23.381.000	100%	23.476.000		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut				34.000.000		21.084.000		21.169.000		21.254.000		21.340.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	21	34.000.000	21	21.084.000	21	21.169.000	21	21.254.000	21	21.340.000		
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		2.109.000		2.118.000		2.127.000		2.136.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	3	0	3	2.109.000	3	2.118.000	3	2.127.000	3	2.136.000		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				67.480.986		39.798.000		39.957.000		40.116.000		40.277.000		
Terlaksananya Penyediaan	Persentase pemenuhan	100%	100%	67.480.986	100%	39.798.000	100%	39.957.000	100%	40.116.000	100%	40.277.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan													
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.697.100		30.120.000		30.240.000		30.360.000		30.482.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	41.697.100	3	30.120.000	3	30.240.000	3	30.360.000	3	30.482.000		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.783.886		9.678.000		9.717.000		9.756.000		9.795.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	25.783.886	3	9.678.000	3	9.717.000	3	9.756.000	3	9.795.000		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik				16.000.000		30.120.000		30.240.000		30.360.000		30.480.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	100%	100%	16.000.000	100%	30.120.000	100%	30.240.000	100%	30.360.000	100%	30.480.000		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.000.000		30.120.000		30.240.000		30.360.000		30.480.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	16.000.000	10	30.120.000	10	30.240.000	10	30.360.000	10	30.480.000		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				709.767.200		1.940.886.000		1.948.649.000		1.956.442.000		1.964.269.000		
Meningkatnya Penataan organisasi yang	Persentase dokumen penataan	100%	100%	709.767.200	100%	1.940.886.000	100%	1.948.649.000	100%	1.956.442.000	100%	1.964.269.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
efektif dan efisien	organisasi yang terselesaikan sesuai ketentuan													
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				213.925.200		527.308.000		529.417.000		531.534.000		533.660.000		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2	213.925.200	2	527.308.000	2	529.417.000	2	531.534.000	2	533.660.000		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				300.969.500		905.289.000		908.910.000		912.545.000		916.196.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	2	300.969.500	2	905.289.000	2	908.910.000	2	912.545.000	2	916.196.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				194.872.500		508.289.000		510.322.000		512.363.000		514.413.000		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	194.872.500	2	508.289.000	2	510.322.000	2	512.363.000	2	514.413.000		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	1.868.174.037,99	100	4.600.639.999,17	100	5.060.703.779,09	100	5.566.774.277	100	6.123.450.714,7	4.01.0.00.00.01.0002 - Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	100		100		100		100		100			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	77,2	79,2		80,2		81,2		82,2		83,2			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baselin e Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengamp u	Ketera ngan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	(Angka)													
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.201.800		48.631.600		53.494.700		58.844.200		64.728.600		
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	100%	100%	44.201.800	100%	48.631.600	100%	53.494.700	100%	58.844.200	100%	64.728.600		
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.302.000		38.833.200		42.716.500		46.988.200		51.687.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	35.302.000	6	38.833.200	6	42.716.500	6	46.988.200	6	51.687.000		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian				8.899.800		9.798.400		10.778.200		11.856.000		13.041.600		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	8.899.800	6	9.798.400	6	10.778.200	6	11.856.000	6	13.041.600		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				854.169.577,99		2.041.366.120		2.245.502.692		2.470.052.981,2		2.717.058.209,32		
Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	854.169.577,99	100%	2.041.366.120	100%	2.245.502.692	100%	2.470.052.981,2	100%	2.717.058.209,32		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
sesuai ketentuan	tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan													
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				780.169.577,99		1.703.050.120		1.873.355.092		2.060.690.621,2		2.266.759.613,32		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	212	212	780.169.577,99	212	1.703.050.120	212	1.873.355.092	212	2.060.690.621,2	212	2.266.759.613,32		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				74.000.000		338.316.000		372.147.600		409.362.360		450.298.596		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	876	876	74.000.000	876	338.316.000	876	372.147.600	876	409.362.360	876	450.298.596		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.253.400		501.980.600		552.178.660		607.396.526		668.136.178,6		
Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas Pegawai ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	100%	100%	31.253.400	100%	501.980.600	100%	552.178.660	100%	607.396.526	100%	668.136.178,6		
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				31.253.400		501.980.600		552.178.660		607.396.526		668.136.178,6		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	31.253.400	100	501.980.600	100	552.178.660	100	607.396.526	100	668.136.178,6		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				228.487.510		655.403.065,8		720.943.252,38		793.037.647,62		872.341.362,38		
Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	100%	100%	228.487.510	100%	655.403.065,8	100%	720.943.252,38	100%	793.037.647,62	100%	872.341.362,38		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.966.610		187.956.076		206.751.683,6		227.426.851,96		250.169.537,16		
Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	15	15	89.966.610	15	187.956.076	15	206.751.683	15	227.426.851,	15	250.169.537,		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)							,6		96		16		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				79.330.900		158.848.226,8		174.732.929,48		192.206.292,43		211.426.871,67		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	79.330.900	5	158.848.226,8	5	174.732.929,48	5	192.206.292,43	5	211.426.871,67		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				59.190.000		308.598.763		339.458.639,3		373.404.503,23		410.744.953,55		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	59.190.000	10	308.598.763	10	339.458.639,3	10	373.404.503,23	10	410.744.953,55		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah				69.612.000		76.581.500		84.239.600		92.663.500		101.929.900		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan	100%	100%	69.612.000	100%	76.581.500	100%	84.239.600	100%	92.663.500	100%	101.929.900		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.612.000		76.581.500		84.239.600		92.663.500		101.929.900		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	69.612.000	4	76.581.500	4	84.239.600	4	92.663.500	4	101.929.900		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				474.754.950		999.576.113,37		1.099.533.774,71		1.209.487.232,18		1.330.435.925,4		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Meningkatnya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	474.754.950	100%	999.576.113,37	100%	1.099.533.774,71	100%	1.209.487.232,18	100%	1.330.435.925,4		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				18.039.000		29.322.250		32.254.525		35.480.057,5		39.028.033,25		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	24	18.039.000	24	29.322.250	24	32.254.525	24	35.480.057,5	24	39.028.033,25		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.880.000		3.484.800		3.833.280		4.216.608		4.638.268,8		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	12	2.880.000	12	3.484.800	12	3.833.280	12	4.216.608	12	4.638.268,8		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.000.000		169.400.000		186.340.000		204.974.000		225.471.400		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	38.000.000	4	169.400.000	4	186.340.000	4	204.974.000	4	225.471.400		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				415.835.950		797.369.063,37		877.105.969,71		964.816.566,68		1.061.298.223,35		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	12	415.835.950	12	797.369.063,37	12	877.105.969,71	12	964.816.566,68	12	1.061.298.223,35		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Disediakan (Laporan)													
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.694.800		277.101.000		304.811.100		335.292.190		368.820.539		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	100%	100%	165.694.800	100%	277.101.000	100%	304.811.100	100%	335.292.190	100%	368.820.539		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.533.000		69.877.500		76.865.250		84.551.775		93.006.952,5		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	25.533.000	1	69.877.500	1	76.865.250	1	84.551.775	1	93.006.952,5		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.161.800		172.903.500		190.193.850		209.213.215		230.134.586,5		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	90.161.800	14	172.903.500	14	190.193.850	14	209.213.215	14	230.134.586,5		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		34.320.000		37.752.000		41.527.200		45.679.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	50.000.000	20	34.320.000	20	37.752.000	20	41.527.200	20	45.679.000		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,2	79,2	62.056.462.231,73	80,2	67.325.289.591,04	81,2	72.684.408.948,41	82,2	78.471.181.701,94	83,2	84.719.777.077,28	4.01.0.00.000.01.0006 - Bagian Umum, Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	
	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	91	92		94		95		96		97			
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	73,5	75		77		80		82		85			
	Nilai SAKIP Bagian Umum,	70,97	81,5		82		82,5		83		83,5			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Protokol dan Komunikasi Pimpinan													
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.846.675.962,1		30.167.298.330,19		32.580.682.196,61		35.187.136.772,34		38.002.107.714,12		
Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	25.846.675.962,1	100%	30.167.298.330,19	100%	32.580.682.196,61	100%	35.187.136.772,34	100%	38.002.107.714,12		
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				25.512.235.962,1		29.757.472.026,19		32.138.069.788,29		34.709.115.371,35		37.485.844.601,06		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	140	140	25.512.235.962,1	140	29.757.472.026,19	140	32.138.069.788,29	140	34.709.115.371,35	140	37.485.844.601,06		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi				334.440.000		409.826.304		442.612.408,32		478.021.400,99		516.263.113,06		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	32	36	334.440.000	36	409.826.304	36	442.612.408,32	36	478.021.400,99	36	516.263.113,06		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				22.000.000		24.336.000		25.309.440		26.321.817,6		27.374.690,3		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana sesuai ketentuan	100%	100%	22.000.000	100%	24.336.000	100%	25.309.440	100%	26.321.817,6	100%	27.374.690,3		
4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				22.000.000		24.336.000		25.309.440		26.321.817,6		27.374.690,3		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik	Jumlah Dokumen Pengamanan	2	3	22.000.000	3	24.336.000	3	25.309.440	3	26.321.817,6	3	27.374.690,3		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)													
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				753.810.000		661.488.768		714.407.869,44		771.560.499		833.285.338,91		
Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas Pegawai ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	100%	100%	753.810.000	100%	661.488.768	100%	714.407.869,44	100%	771.560.499	100%	833.285.338,91		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				753.810.000		661.488.768		714.407.869,44		771.560.499		833.285.338,91		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6	6	753.810.000	6	661.488.768	6	714.407.869,44	6	771.560.499	6	833.285.338,91		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat				11.527.612.485		13.738.077.900		14.837.124.132,01		16.024.094.062,55		17.306.021.587,56		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	100%	100%	11.527.612.485	100%	13.738.077.900	100%	14.837.124.132,01	100%	16.024.094.062,55	100%	17.306.021.587,56		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				405.029.500		325.760.006,88		351.820.807,43		379.966.472,02		410.363.789,79		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	12	405.029.500	12	325.760.006,88	12	351.820.807,43	12	379.966.472,02	12	410.363.789,79		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				2.864.875.385		1.393.277.047,2		1.504.739.210,98		1.625.118.347,85		1.755.127.815,68		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	20	2.864.875.385	20	1.393.277.047,2	20	1.504.739.210,98	20	1.625.118.347,85	20	1.755.127.815,68		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				177.328.600		52.276.065,12		56.458.150,33		60.974.802,36		65.852.786,54		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	6	177.328.600	6	52.276.065,12	6	56.458.150,33	6	60.974.802,36	6	65.852.786,54		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.120.590.000		3.733.471.440		4.032.149.155,2		4.354.721.087,62		4.703.098.774,63		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	36	36	2.120.590.000	36	3.733.471.440	36	4.032.149.155,2	36	4.354.721.087,62	36	4.703.098.774,63		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				140.001.000		103.266.057,6		111.527.342,21		120.449.529,58		130.085.491,95		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	12	140.001.000	12	103.266.057,6	12	111.527.342,21	12	120.449.529,58	12	130.085.491,95		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.184.814.000		2.672.838.259,2		2.886.665.319,94		3.117.598.545,53		3.367.006.429,17		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	56	60	3.184.814.000	60	2.672.838.259,2	60	2.886.665.319,94	60	3.117.598.545,53	60	3.367.006.429,17		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.634.974.000		5.457.189.024		5.893.764.145,92		6.365.265.277,59		6.874.486.499,8		
Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	46	48	2.634.974.000	48	5.457.189.024	48	5.893.764.145,92	48	6.365.265.277,59	48	6.874.486.499,8		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0		4		45,92		7,59		9,8		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.444.763.741,76		10.943.026.677,13		11.818.468.811,3		12.763.946.316,19		13.785.062.021,5		
Meningkatnya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	12.444.763.741,76	100%	10.943.026.677,13	100%	11.818.468.811,3	100%	12.763.946.316,19	100%	13.785.062.021,5		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				244.299.400		271.606.037,76		293.334.520,78		316.801.282,44		342.145.385,04		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	244.299.400	12	271.606.037,76	12	293.334.520,78	12	316.801.282,44	12	342.145.385,04		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	(Laporan)													
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.211.370.901,76		4.184.812.502,29		4.519.597.502,48		4.881.165.302,67		5.271.658.526,89		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	3.211.370.901,76	36	4.184.812.502,29	36	4.519.597.502,48	36	4.881.165.302,67	36	5.271.658.526,89		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.367.922.500		1.425.789.864		1.539.853.053,12		1.663.041.297,37		1.796.084.601,16		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	1.367.922.500	12	1.425.789.864	12	1.539.853.053,12	12	1.663.041.297,37	12	1.796.084.601,16		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	(Laporan)													
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.621.170.940		5.060.818.273,08		5.465.683.734,92		5.902.938.433,71		6.375.173.508,41		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	42	48	7.621.170.940	48	5.060.818.273,08	48	5.465.683.734,92	48	5.902.938.433,71	48	6.375.173.508,41		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.343.294.550		7.616.743.632		8.226.083.122,56		8.884.169.772,36		9.594.903.354,15		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan	100%	100%	7.343.294.550	100%	7.616.743.632	100%	8.226.083.122,56	100%	8.884.169.772,36	100%	9.594.903.354,15		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	siap pakai													
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.045.990.700		2.490.264.000		2.689.485.120		2.904.643.929,6		3.137.015.443,97		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	20	2.045.990.700	20	2.490.264.000	20	2.689.485.120	20	2.904.643.929,6	20	3.137.015.443,97		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				3.170.702.600		3.453.710.400		3.730.007.232		4.028.407.810,56		4.350.680.435,4		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	126	155	3.170.702.600	155	3.453.710.400	155	3.730.007.232	155	4.028.407.810,56	155	4.350.680.435,4		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				50.000.000		58.320.000		62.985.600		68.024.448		73.466.403,84		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	100	100	50.000.000	100	58.320.000	100	62.985.600	100	68.024.448	100	73.466.403,84		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				410.750.000		350.794.800		378.858.384		409.167.054,72		441.900.419,1		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	100	410.750.000	100	350.794.800	100	378.858.384	100	409.167.054,72	100	441.900.419,1		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.665.851.250		1.263.654.432		1.364.746.786,56		1.473.926.529,48		1.591.840.651,84		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	7	1.665.851.250	7	1.263.654.432	7	1.364.746.786,56	7	1.473.926.529,48	7	1.591.840.651,84		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.469.314.692,87		2.416.385.655,88		2.601.043.708,35		2.800.128.293,02		3.014.779.687,98		
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai	100%	100%	2.469.314.692,87	100%	2.416.385.655,88	100%	2.601.043.708,35	100%	2.800.128.293,02	100%	3.014.779.687,98		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	ketentuan													
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200.000.000,08		216.320.000		224.972.800		233.971.712		243.330.580,48		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	200.000.000,08	2	216.320.000	2	224.972.800	2	233.971.712	2	243.330.580,48		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				508.195.000		360.673.041,6		389.526.884,93		420.689.035,72		454.344.158,58		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	12	12	508.195.000	12	360.673.041,6	12	389.526.884,93	12	420.689.035,72	12	454.344.158,58		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
dan Wakil Kepala Daerah	dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)													
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.761.119.692,79		1.839.392.614,28		1.986.544.023,42		2.145.467.545,3		2.317.104.948,92			
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	1.761.119.692,79	2	1.839.392.614,28	2	1.986.544.023,42	2	2.145.467.545,3	2	2.317.104.948,92		
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.233.664.600		1.325.993.379,84		1.432.072.850,22		1.546.638.678,24		1.670.369.772,5			
Tersedianya Laporan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	11	12	1.233.664.600	12	1.325.993.379,84	12	1.432.072.850,22	12	1.546.638.678,24	12	1.670.369.772,5		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan	Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				724.676.600		779.176.895,04		841.511.046,64		908.831.930,37		981.538.484,8		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	724.676.600	12	779.176.895,04	12	841.511.046,64	12	908.831.930,37	12	981.538.484,8		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala				508.988.000		546.816.484,8		590.561.803,58		637.806.747,87		688.831.287,7		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	11	12	508.988.000	12	546.816.484,8	12	590.561.803,58	12	637.806.747,87	12	688.831.287,7		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				415.326.200		431.939.248		449.216.817,92		467.185.490,64		485.872.910,26		
Meningkatnya Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	415.326.200	100%	431.939.248	100%	449.216.817,92	100%	467.185.490,64	100%	485.872.910,26		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				110.660.000		115.086.400		119.689.856		124.477.450,24		129.456.548,25		
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	24	24	110.660.000	24	115.086.400	24	119.689.856	24	124.477.450,24	24	129.456.548,25		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				304.666.200		316.852.848		329.526.961,92		342.708.040,4		356.416.362,01		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	150	150	304.666.200	150	316.852.848	150	329.526.961,92	150	342.708.040,4	150	356.416.362,01		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	89	91	1.176.513.984,09	92	2.744.239.253	93	2.963.778.393	94	3.200.880.664	95	3.456.951.117	4.01.0.00.00.01.0009 - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	89	91		92		93		94		95			
	Indeks Profesional ASN Peringkat Daerah (Angka)	77,2	81,2		81,8		82,4		82,9		83,4			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				316.769.600		692.907.368		748.339.957		808.207.154		872.863.726		
Meningkatnya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	316.769.600	100%	692.907.368	100%	748.339.957	100%	808.207.154	100%	872.863.726		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				316.769.600		692.907.368		748.339.957		808.207.154		872.863.726		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20	20	316.769.600	20	692.907.368	20	748.339.957	20	808.207.154	20	872.863.726		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian				3.000.000		436.764.000		471.705.120		509.441.530		550.196.852		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Perangkat Daerah														
Meningkatnya pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai ASN	100%	100%	3.000.000	100%	436.764.000	100%	471.705.120	100%	509.441.530	100%	550.196.852		
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		436.764.000		471.705.120		509.441.530		550.196.852		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	3.000.000	100	436.764.000	100	471.705.120	100	509.441.530	100	550.196.852		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat				634.187.400		725.060.451		783.045.287		845.710.509		913.367.351		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Daerah														
Terlaksananya Penyediaan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Administrasi umum, Barang dan Jasa sesuai ketentuan	100%	100%	634.187.400	100%	725.060.451	100%	783.045.287	100%	845.710.509	100%	913.367.351		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				603.921.800		591.127.740		638.417.959		689.491.396		744.650.708		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	603.921.800	4	591.127.740	4	638.417.959	4	689.491.396	4	744.650.708		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.534.600		101.563.215		109.668.272		118.463.333		127.940.400		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	24.534.600	4	101.563.215	4	109.668.272	4	118.463.333	4	127.940.400		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	(Paket)													
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.731.000		32.369.496		34.959.056		37.755.780		40.776.243		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	5.731.000	4	32.369.496	4	34.959.056	4	37.755.780	4	40.776.243		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				221.150.792		814.021.309		879.163.014		949.474.455		1.025.432.411		
Meningkatnya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	221.150.792	100%	814.021.309	100%	879.163.014	100%	949.474.455	100%	1.025.432.411		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa				916.000		4.207.500		4.544.100		4.907.628		5.300.238		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	916.000	4	4.207.500	4	4.544.100	4	4.907.628	4	5.300.238		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.750.000		47.250.000		51.030.000		55.112.400		59.521.392		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	3.750.000	4	47.250.000	4	51.030.000	4	55.112.400	4	59.521.392		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				216.484.792		762.563.809		823.588.914		889.454.427		960.610.781		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan	4	4	216.484.792	4	762.563.809	4	823.588.914	4	889.454.427	4	960.610.781		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)													
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.406.192,09		75.486.125		81.525.015		88.047.016		95.090.777		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	100%	100%	1.406.192,09	100%	75.486.125	100%	81.525.015	100%	88.047.016	100%	95.090.777		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				600.000		64.375.000		69.525.000		75.087.000		81.093.960		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	600.000	1	64.375.000	1	69.525.000	1	75.087.000	1	81.093.960		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				806.192,09		11.111.125		12.000.015		12.960.016		13.996.817		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	806.192,09	1	11.111.125	1	12.000.015	1	12.960.016	1	13.996.817		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Lapangan	(Unit)													
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				65.067.157.350,45		66.432.231.576		65.326.963.845		72.586.604.796		75.813.457.071		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	90,5	92	64.386.407.150,45	93	60.605.817.776	94	59.201.108.665	94,5	66.126.164.098	95	68.987.472.303	4.01.0.00.000.01.0003 - Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				59.161.407.150,45		56.930.817.776		55.342.358.665		62.074.476.598		64.733.200.428		
Meningkatnya Fasilitas kebijakan bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kebijakan bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	59.161.407.150,45	100%	56.930.817.776	100%	55.342.358.665	100%	62.074.476.598	100%	64.733.200.428		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				37.297.175.200		43.950.893.270		46.148.437.933		48.455.859.830		50.878.652.821		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	12	12	37.297.175.200	12	43.950.893.270	12	46.148.437.933	12	48.455.859.830	12	50.878.652.821		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				5.258.330.000		8.700.000.000		4.700.000.000		8.900.000.000		8.900.000.000		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	3	3	5.258.330.000	3	8.700.000.000	3	4.700.000.000	3	8.900.000.000	3	8.900.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)													
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			16.605.901.950,45		4.279.924.506		4.493.920.732		4.718.616.768		4.954.547.607			
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	6	6	16.605.901.950,45	6	4.279.924.506	6	4.493.920.732	6	4.718.616.768	6	4.954.547.607		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)													
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				5.225.000.000		3.675.000.000		3.858.750.000		4.051.687.500		4.254.271.875		
Meningkatnya efektivitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	6	6	5.225.000.000	6	3.675.000.000	6	3.858.750.000	6	4.051.687.500	6	4.254.271.875		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				5.225.000.000		3.675.000.000		3.858.750.000		4.051.687.500		4.254.271.875		
Terlaksananya Fasilitas Kerja	Jumlah Dokumen Hasil	6	6	5.225.000.000	6	3.675.000.000	6	3.858.750.000	6	4.051.687.500	6	4.254.271.875		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)			0		0		00		0		5		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan Pemerintahan dan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti (%)	85	87	297.326.200	88	3.012.000.000	89	3.030.000.000	90	3.055.000.000	92	3.080.000.000	4.01.0.00.00.01.0008 - Bagian Tata Pemerintahan	
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				244.392.700		962.000.000		970.000.000		980.000.000		990.000.000		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	244.392.700	100%	962.000.000	100%	970.000.000	100%	980.000.000	100%	990.000.000		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				8.576.500		285.000.000		290.000.000		295.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penataan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan	1	1	8.576.500	1	285.000.000	1	290.000.000	1	295.000.000	1	300.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan (Dokumen)													
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				223.816.200		477.000.000		480.000.000		485.000.000		490.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2	2	223.816.200	2	477.000.000	2	480.000.000	2	485.000.000	2	490.000.000		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				12.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	1	12.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				52.933.500		2.050.000.000		2.060.000.000		2.075.000.000		2.090.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Meningkatnya Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase kebijakan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	52.933.500	100%	2.050.000.000	100%	2.060.000.000	100%	2.075.000.000	100%	2.090.000.000		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				50.333.500		975.000.000		980.000.000		990.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	30	30	50.333.500	30	975.000.000	30	980.000.000	30	990.000.000	30	1.000.000.000		
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan				2.600.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kerja Sama														
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1	2.600.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000		
Meningkatnya penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum dan pendokumentasian produk hukum yang dilaksanakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	97,4	97,45	383.424.000	97,47	2.814.413.800	97,5	3.095.855.180	97,52	3.405.440.698	97,55	3.745.984.768	4.01.0.00.000.01.0001 - Bagian Hukum	
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				383.424.000		2.814.413.800		3.095.855.180		3.405.440.698		3.745.984.768		
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyusunan produk hukum dan bantuan hukum dan dokumentasi produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	383.424.000	100%	2.814.413.800	100%	3.095.855.180	100%	3.405.440.698	100%	3.745.984.768		
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi				110.940.000		1.050.453.80		1.131.895.1		1.308.480.69		1.567.024.76		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Penyusunan Produk Hukum Daerah					0		80		8		8			
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	673	200	110.940.000	685	1.050.453.800	690	1.131.895.180	695	1.308.480.698	700	1.567.024.768		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				211.100.000		1.568.960.000		1.768.960.000		1.900.960.000		1.980.960.000		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	113	14	211.100.000	119	1.568.960.000	120	1.768.960.000	122	1.900.960.000	123	1.980.960.000		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				61.384.000		195.000.000		195.000.000		196.000.000		198.000.000		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	600	100	61.384.000	630	195.000.000	635	195.000.000	640	196.000.000	645	198.000.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Informasi Hukum	Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)													
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2.904.523.700		4.829.506.900		5.271.575.360		5.754.580.090		6.282.352.662		
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Angka)	100	100	2.264.523.700	100	2.785.390.900	100	3.063.930.080	100	3.370.323.188	100	3.707.355.207	4.01.0.00.000.01.0002 - Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	
	Tingkat Inflasi ((%))	1,57	1,55		1,54		1,53		1,52		1,51			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				1.024.845.800		1.045.012.300		1.149.513.700		1.264.465.000		1.390.911.400		
Meningkatnya Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi serta pembinaan	Persentase kebijakan perekonomian yang	100%	100%	1.024.845.800	100%	1.045.012.300	100%	1.149.513.700	100%	1.264.465.000	100%	1.390.911.400		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
kebijakan perekonomian	ditindaklanjuti													
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				482.284.200		134.387.000		147.825.700		162.608.300		178.869.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	12	12	482.284.200	12	134.387.000	12	147.825.700	12	162.608.300	12	178.869.000		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				432.499.900		474.112.300		521.523.500		573.675.900		631.043.500		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi	12	12	432.499.900	12	474.112.300	12	521.523.500	12	573.675.900	12	631.043.500		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Perekonomian	Perekonomian (Laporan)													
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				108.651.900		232.946.700		256.241.400		281.865.500		310.052.000		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	12	12	108.651.900	12	232.946.700	12	256.241.400	12	281.865.500	12	310.052.000		
4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1.285.000		98.168.800		107.985.700		118.784.300		130.662.700		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan	12	12	1.285.000	12	98.168.800	12	107.985.700	12	118.784.300	12	130.662.700		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
BLUD	BLUD (Dokumen)													
4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				124.800		105.397.500		115.937.400		127.531.000		140.284.200		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	4	4	124.800	4	105.397.500	4	115.937.400	4	127.531.000	4	140.284.200		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				296.500.000		770.382.800		847.421.080		932.163.188		1.025.379.507		
Meningkatnya fasilitas administrasi pembangunan	Persentase pedoman administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	296.500.000	100%	770.382.800	100%	847.421.080	100%	932.163.188	100%	1.025.379.507		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan				296.500.000		770.382.800		847.421.080		932.163.188		1.025.379.507		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	4	296.500.000	4	770.382.800	4	847.421.080	4	932.163.188	4	1.025.379.507		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			100%	943.177.900	100%	969.995.800	100%	1.066.995.300	100%	1.173.695.000	100%	1.291.064.300		
Meningkatnya pemantauan kebijakan sumber daya alam	Persentase hasil pemantauan kebijakan Sumberdaya alam yang ditindaklanjuti	100%	100%	943.177.900	100%	969.995.800	100%	1.066.995.300	100%	1.173.695.000	100%	1.291.064.300		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				854.925.000		873.249.700		960.574.700		1.056.632.200		1.162.295.300		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	12	12	854.925.000	12	873.249.700	12	960.574.700	12	1.056.632.200	12	1.162.295.300		
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan				39.279.900		43.063.500		47.369.800		52.106.800		57.317.500		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4	4	39.279.900	4	43.063.500	4	47.369.800	4	52.106.800	4	57.317.500		
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				48.973.000		53.682.600		59.050.800		64.956.000		71.451.500		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4	4	48.973.000	4	53.682.600	4	59.050.800	4	64.956.000	4	71.451.500		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	60	66	640.000.000	70	2.044.116.000	72	2.207.645.280	76	2.384.256.902	80	2.574.997.455	4.01.0.00.000.01.0009 - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	
	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadaan Barang dan	88,25	88,75		89		89,25		89,5		89,75			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Jasa (Angka)													
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				640.000.000		2.044.116.000		2.207.645.280		2.384.256.902		2.574.997.455		
Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara efisien dan akuntabel	Persentase Layanan pengadaan secara elektronik, peminaan dan advokasi PBJ dan layanan pengelolaan PBJ yang terfasilitasi	100%	100%	640.000.000	100%	2.044.116.000	100%	2.207.645.280	100%	2.384.256.902	100%	2.574.997.455		
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				200.000.000		216.300.000		227.115.000		238.470.750		250.394.288		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	20	20	200.000.000	20	216.300.000	20	227.115.000	20	238.470.750	20	250.394.288		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Bagian Pengampu	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				240.000.000		383.775.000		402.963.750		423.111.938		444.267.534		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	200	200	240.000.000	200	383.775.000	200	402.963.750	200	423.111.938	200	444.267.534		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				200.000.000		1.444.041.000		1.577.566.530		1.722.674.214		1.880.335.633		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	500	500	200.000.000	500	1.444.041.000	500	1.577.566.530	500	1.722.674.214	500	1.880.335.633		

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota		Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan RB	Bagian Organisasi
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang ditindaklanjuti	Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Organisasi Kesejahteraan Rakyat

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)	Nilai	70,10	71,00	72,00	75,00	81,00	81,05	
2	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,63	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks	70,19	70,76	72,45	72,99	73,69	74,28	
4	Persentase Perangkat daerah Yang didampingi dan mendapatkan Nilai SAKIP Minimal A (%)	Persentase	50	60	70	80	85	87	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN (Pengampu Utama/ Koordinator)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	98,15 (A/ Zona Hijau)	98,25 (A/ Zona Hijau)	98,35 (A/ Zona Hijau)	98,45 (A/ Zona Hijau)	98,55 (A/ Zona Hijau)	98,65 (A/ Zona Hijau)	Bagian Organisasi
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	positif	%	60	61	62	63	64	Bagian Hukum
3	Kulifikasi dan Kompetensi SDM	Poin	60	75	80	85	88	90	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	80	80	85	88	90	92	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	60	63	65	70	80	85	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Jember

